

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM YANG DIMODERASI
OLEH KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
(Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



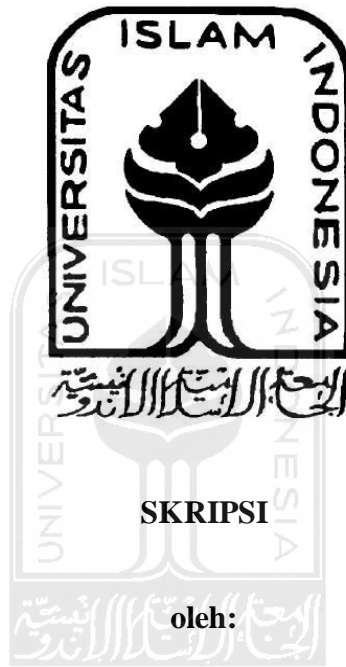
Nama : Rizka Amellia

Nomor Mahasiswa : 08312020

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM YANG DIMODERASI
OLEH KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
(Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Nama : Rizka Amellia

Nomor Mahasiswa : 08312020

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM YANG DIMODERASI
OLEH KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
(Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**



oleh:

Nama : Rizka Amellia

Nomor Mahasiswa : 08312020

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, 1 Maret 2012

Penulis,



(Rizka Amellia)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM YANG DIMODERASI
OLEH KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
(Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Hasil Penelitian



diajukan oleh:

Nama : Rizka Amellia

Nomor Mahasiswa : 08312020

Telah dietujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27 Februari 2012

Dosen Pembimbing,



Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self
Assesment System Yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh
(Studi Kasus Pada BMT dan di Sleman, DIY)

Disusun Oleh: **RIZKA AMELLIA**
Nomor Mahasiswa: **08312020**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 April 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Dra. Ataina Hidayati, M.Si, Ak, Ph.D



البحث والاستدلال لا يبدؤان
إلا بالعلم



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO

Maka sesungguhnya disamping ada kesukaran pasti ada kemudahan.

(QS. Al Insyirah 5)

Dialah yang membuat tidak ada menjadi tampak nyata, dan meskipun yang nyata ada, Dia pulalah yang membuatnya menjadi tidak tampak.

(Jalaludin Rumi)

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Pilih, lakukan dan jalani hidup dengan keikhlasan, serta selalu berusaha berpikir positif.

Sebuah kebahagiaan apabila kita mampu membuat tersenyum pada wajah orang-orang yang kita sayangi.

Cara mudah untuk bahagia adalah dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan tidak membandingkannya dengan orang lain.

Salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat air mata bahagia dari seorang Ibu yang bangga karena prestasi anaknya. 😊

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk

ALLAH SWT

Ibunda & Ayahanda Tercinta

Kakak & Adik ku Tersayang

Semua orang yang telah mendukung dan memberikan semangat tiada henti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Memelihara, Yang Maha Mendatangkan Bahaya dan Manfaat, serta Sholawat dan Salam kami sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw., beserta para sahabat dan pengikut-Nya sampai akhir zaman. Amin.

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, tiada katta yang dapat penulis sampaikan selain kata syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM YANG DIMODERASI OLEH KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH (Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan maupun motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Maka dalam kesempatan kali ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Isti Rahayu selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Beliau penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.
6. Seluruh Dosen Pengajar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi penulis, semoga bermanfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat.
7. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
8. Bambang Sunarjo, S.E., S.AP dan Romiyati selaku orang tua yaitu lentera hidup penulis yang senantiasa memberikan kesabaran, perhatian, kasih sayang, doa, motivasi dan merupakan kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segalanya, love you forever. ({}):*
9. Rizky Damayanti, S.AB(kakak) dan Riza Widya Rachmawati (adik), yang selalu memberikan masukan positif dan semangat. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang kalian, semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin.
10. Om Aziz Dwi Hartono, kerabat Papa yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Surya Danu Pradana, seseorang yang telah menemani hari-hari selama penulis kuliah dan tinggal di kota pelajar ini, serta berada disampingku ketika suka dan duka, saat senang, sedih, bahagia, galau, terharu itu semua karena dia. Meski kita sudah tidak ada hubungan istimewa lagi, semoga kita akan tetap bisa bersahabat dan menjalin persaudaraan dengan

silaturahmi yang baik. Amin. Mama Nina Larasati yang telah menjadi ibu kedua selama mengenal Surya, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan, Amel akan selalu sayang Mama Nina. ({}):*

12. Sahabat terbaik dari SMA sampai sekarang yaitu Aditya Kusuma, yang selalu menemani kuliner, hangout, mendengarkan curhatan, memberikan semangat dan kekuatan kepada penulis dalam setiap keadaan, doa dan motivasimu yang dapat membuat aku tegar menjalani hari-hari. Terima kasih selalu ada dan telah menemaniku selama ini dalam suka dan duka.
13. “Genk Vegetables a.k.a SAYUR”; Destika Anggun ‘dek Wogh’, Riska Rhamadani ‘baboni’, Meira Dewi ‘memeichan’, Cika Nur Rohimi ‘dek Cikong’, Meita Nur Fitriana ‘lamente’, Shitalaras Pungky ‘dek Yash’, Ajeng Santi ‘tete’, terima kasih atas semua support, tawa, canda, suka, duka, kebahagiaan kesedihan kebencian yang tercampur menjadi satu dan semua yang telah kita lewati bersama, semua tidak akan terlupakan. Semoga persahabatan ini akan selalu terjalin selamanya. ({}):*
14. Sahabat dari awal semester satu “L’Cooper” Farizki Fajrin, Arie Muslandani, Rian Ubay, Destika Anggun dan Ajeng Santi yang telah menemani hari-hari dari awal masa perkuliahan hingga sekarang ini. Hal yang menyenangkan adalah bertemu dan mengenal kalian. Terima kasih atas kebersamaan yang tercipta selama ini, dengan kelulusan kita semua semoga kita dapat berjumpa lagi di kesuksesan mendatang. ({}):*
15. Mas Ilham Ichsan Nurrizal ‘Kamplengskie’, Mas Rezca Syam ‘Prince’, Mas Omi dan anak-anak kontrakan “MALINGMATI” Mas Hendro, Om Bowo, Om Kodok, Om Bobi, Tyas, Mbak Nita, senang sekali bertemu dan mengenal kalian anak-anak eksis, gaul, seru, asyik, gokil dan apa adanya. Terima kasih telah membuat hariku semakin berwarna. ({}):*
16. Seluruh teman-teman KKN unit BY-10 : Rifqi Yaqob ‘Mas Aji’, M. Banar Wicaksono ‘Mas Bro’, Aristia Oktaviningtyas ‘Mbak Bernard’, Imam Jayanto ‘Simin’, M. Hafiz Hamidi ‘Buntal’, Alfath Trista Meytika

‘Mbel’, Elly Rosita ‘cungkring’, serta keluarga baruku seluruh warga sengon dan tegalsari, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama 1 bulan di Sengon, Selo, Boyolali yang sangat menyenangkan dan memberikan kenangan yang tidak mungkin terlupakan. Semoga tali silaturahmi dan kekeluargaan kita tetap terjalin dan tidak akan pernah putus.({}) :*

17. Teman-teman FE UII 2008 dan para senior khususnya untuk mahasiswa jurusan akuntansi, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
18. Semua teman-teman dimanapun berada yg datang dan pergi yang telah memberikan banyak pelajaran hidup sehingga penulis dapat lebih mengerti tentang kehidupan, suka dan duka telah penulis lewati baik selama masa studi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun selama penulis berada di Kota Yogyakarta.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik dalam menjalankan masa studi maupun selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amalan dan kebaikan mereka memperoleh balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Untuk semua masukan yang membangun, penulis mengucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga tulisan sederhana ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2012

Rizka Amellia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul Depan Skripsi	ii
Halaman Judul Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Halaman Pengesahan Skripsi	v
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstak	xviii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Pajak	10
2.2. Pengertian Wajib Pajak dan Dasar Hukumnya	16
2.3. Pengertian Self Assessment System	18
2.4. Kewajiban Perpajakan	20

2.5. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi	20
2.5.1. Pengetahuan Pajak	21
2.5.2. Persepsi Terhadap Petugas Pajak	22
2.5.3. Besarnya Tarif Pajak Yang Dibebankan	23
2.6. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	23
2.7. Penelitian Terdahulu	26
2.8. Perumusan Hipotesis	28
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Data dan Sumber Data	33
3.2. Metode Pengumpulan Data	33
3.3. Variabel Penelitian	34
3.4. Metode Pengujian Instumen	35
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
3.6. Pengujian Hipotesis	38
BAB IV	
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Sampel Penelitian.....	41
4.2. Deskripsi Responden	41
4.2.1. Karakteristik Resp. Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.2.2. Karakteristik Resp. Berdasarkan Jabatan	42
4.2.3. Karakteristik Resp. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
4.2.4. Karakteristik Resp. Berdasarkan Lama Bekerja	43
4.2.5. Karakteristik Resp. Berdasarkan Jenis Usaha	44
4.2.6. Karakteristik Resp. Berdasarkan Lama Operasi	45
4.2.7. Karakteristik Resp. Berdasarkan Omzet Penghasilan	45
4.2.8. Karakteristik Resp. Berdasarkan Produk Usaha	46
4.3. Analisis Deskriptif Statistik	46
4.4. Uji Kualitas Data	50
4.4.1. Hasil Pengujian Validitas	50
4.4.2. Hasil Pengujian Reliabilitas	51

4.5. Analisis Kuantitatif	52
4.5.1. Asumsi Klasik	52
4.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda Moderasi	55
4.5.3. Uji Bersama-sama (Uji F)	59
4.5.4. Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.5.5. Uji Parsial (Uji t)	60
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 4.1.	Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner	41
Tabel 4.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	42
Tabel 4.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 4.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	44
Tabel 4.6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	44
Tabel 4.7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Operasi	45
Tabel 4.8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penghasilan	45
Tabel 4.9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Produk Usaha	46
Tabel 4.10.	Deskriptif Variabel Penelitian	47
Tabel 4.11.	Hasil Uji Validitas	50
Tabel 4.12.	Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.13.	Pengujian Multikolinieritas	53
Tabel 4.14.	Pengujian Autokorelasi	54
Tabel 4.15.	Pengujian Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.16.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Moderasi	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian	71
2. Surat Pengantar Penelitian dari Puskopsyah FORMES	72
3. Kuesioner	73
4. Daftar Responden	79
5. Daftar Sample Penelitian	80
6. Rekapitulasi Data Penelitian	81
7. Uji Validitas dan Reliabilitas	83
8. Hasil Regresi Linier Berganda Moderasi	92
9. Uji Asumsi Klasik	93



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assessment System Yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yang meliputi pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak, tarif pajak dan variabel terikat yaitu pelaksanaan *Self Assessment System* serta variabel moderasi yaitu kriteria Wajib Pajak patuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak dan tarif pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh.

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yaitu BMT dan BPR yang ada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 35 responden. Pengujian analisis kuantitatif penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, R^2 dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak variabel pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak, tarif pajak, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, dan interaksinya mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Self Assessment System, hal ini dibuktikan dengan hasil *P value* yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel bebas tersebut terhadap *Self Assessment System* sebesar 88,6% sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sedangkan secara parsial variabel-variabel pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, tarif pajak yang dibebankan, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*, sedangkan kriteria pajak wajib pajak patuh tidak memoderasi hubungan antara faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dengan *Self Assessment System*.

Kata Kunci: Self Assessment System, Pengetahuan Pajak, Persepsi Terhadap Petugas Pajak, Tarif Pajak, Kriteria Wajib Pajak Patuh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional. Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan.

Selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia mengalami tren yang selalu meningkat. Hingga saat ini tidak kurang dari 76% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2008 dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.

Apabila dipandang dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak untuk dijadikan tulang punggung penerimaan negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan penerimaan pajak yang dicapai tidak terlepas dari tekad Pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian serta partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban. Upaya pemerintah ini tercermin dari intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang perpajakan. Yang dimaksud dengan intensifikasi adalah mengoptimalkan kegiatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pajak, sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang juga berdampak pada pemeriksaan.

Sejak diadakannya Reformasi Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006). Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Terbukti dari masih rendahnya kesadaran masyarakat serta banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh ataupun kombinasi dari keduanya, seperti diungkapkan Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bahwa masih banyak Wajib Pajak di Bangkalan yang cenderung mengecilkan jumlah penghasilannya daripada yang dituliskan Wajib Pajak dalam *self assessment system*.

Rendahya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini menurut Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya. Dalam *self assessment system*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk

tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak dapat tercapai SPT haruslah “*user friendly*” yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh negara, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak berkurang.

Berdasarkan informasi yang ada ternyata jumlah wajib pajak yang tergolong patuh masih sangatlah minim. Pada 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT. Yang menyampaikan SPT masih 8.202.309 wajib pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16 persen (Jakarta, Kompas.com, 7 Maret 2011).

Minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah (1) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, (2) persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak, dan (3) besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak (Djamaludin Ancok, Dr.).

Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) menungkapkan bahwa *Self Assessment System* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya dikarenakan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah (Fiskus) tidak merata. Sementara

penelitian yang dilakukan Damayanti (2004) menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan di Salatiga masih banyak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya sehingga pengawasan fiskus yang terlalu berlebihan akibatnya salah sasaran sering terjadi.

Fenomena yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sekarang ini selain banyaknya instansi penanaman dan peminjaman modal yang berbasis konvensional juga banyak berdiri instansi penanaman dan peminjaman yang berbasis syariah, contoh dari kedua instansi tersebut yaitu BPR dan BMT. Berkembangnya BMT dan BPR ini dikarenakan proses izin mendirikan BMT yang mudah dan tidak rumit selain itu banyak dari masyarakat yang lebih nyaman dengan menggunakan basis syariah dan memang ada pula yang lebih memilih kepada konvensional. Tetapi dibalik itu semua, yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan sistem pembayaran pajaknya, apakah instansi tersebut mau membayar pajak dan mengerti dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif, sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self**

Assessment System Yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Yogyakarta)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*?
2. Apakah persepsi tentang petugas pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*?
3. Apakah besarnya tarif pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assesemt System*?
4. Apakah kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assesemt System*?
5. Apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh?

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi masalah pada penelitian ini sbb. :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada BPR dan BMT yang terdapat di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penulis hanya melakukan penelitian dalam analisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System* dimoderasi oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat atau derajat pengaruh pengetahuan pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.
2. Tingkat atau derajat pengaruh persepsi terhadap petugas pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.
3. Tingkat atau derajat pengaruh besar tarif pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.
4. Tingkat atau derajat pengaruh kriteria Wajib Pajak patuh terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*.
5. Pengaruh hubungan faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis.

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi tentang perpajakan. Dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pendidikan dalam fungsinya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan mahasiswa ekonomi yang terkait dengan perpajakan.

Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijaksanaan tentang perpajakan yang lebih memudahkan bagi wajib pajak di Sleman pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat diterima dan didukung oleh para Wajib Pajak khususnya oleh BMT dan BPR di Sleman, dan dapat mendorong terciptanya peningkatan penerimaan pajak bagi negara untuk pembiayaan penyelenggaraan kenegaraan.

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari topik yang akan dibahas meliputi pengertian objek penelitian, teori-teori yang mendukung, penelitian sebelumnya serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

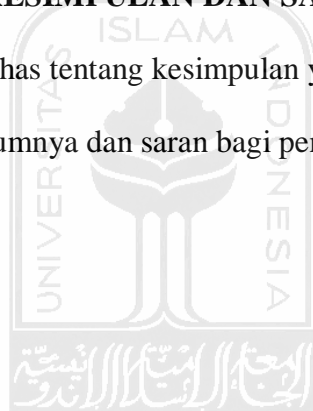
Bab ini menguraikan tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, data sumber data, variabel dan pengukuran variabel, analisis data meliputi teknik pengujian data serta pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, analisis karakteristik responden, analisis deskriptif, serta pembahasan dan hasil analisis atas hipotesis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran bagi penelitian sejenis berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan istilah yang berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berkembang menjadi “pa-ajeg” yang berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya yang diserahkan kepada raja dan pengurus desa tersebut hanyalah berdasar adat kebiasaan semata yang berkembang saat itu (Soemarsaid Moertono dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006). Seiring dengan perkembangan, pajak bukan hanya pungutan yang berasal dari hasil bumi saja, tetapi semua penghasilan, serta maupun hadiah dapat dikenakan pajak. Berikut ini merupakan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

Pajak merupakan pungutan oleh negara yang dibebankan kepada orang pribadi dan badan hukum yang dapat dipaksakan guna pembiayaan pengeluaran publik. Peneliti lain mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang ditunjuk langsung, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan biaya pemerintahan (Prof.Dr.P.J.A.Andriani) dalam (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006).

Menurut Sommorfield seperti yang ditulis Kesit Bambang Prakosa (2006) mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. seperti ditulis Erly Suandy (2005) menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksa

Adanya kewajiban atau keharusan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atau badan hukum kepada pemerintah. Apabila Wajib Pajak atau badan hukum tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (UU No.16 tahun 2000) yang berarti ada sanksi administrasi maupun sanksi fiskal. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditujukan bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

Sedangkan sanksi fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak yang oleh Undang-Undang diancam pidana, karena melawan atau bertentangan dengan hukum, yang dapat merugikan masyarakat dan Negara di bidang perpajakan (Roechmat Soemitro).

2. Tanpa jasa imbalan/kontraprestasi/imbalan langsung

Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya kepada pemerintah. Apa yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Walaupun begitu, Wajib Pajak dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah berupa keamanan dan stabilitas Negara.

3. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, sehingga setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan harus mematuhi Undang-Undang yang telah disetujui oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

4. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah, baik itu yang sifatnya rutin maupun pembangunan.

5. Berfungsi sebagai Budgetair dan Regulerend

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan

dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya.

Fungsi regulasi disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulasi juga disebut fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi Budgetair.

Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, (contohnya: pajak penghasilan).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, (contohnya: PPN).
2. Menurut sifatnya:
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam artian memperhatikan keandalan diri Wajib Pajak, (contohnya: pajak penghasilan).

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keandalan diri Wajib Pajak, (contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

3. Menurut lembaga pemungutannya:

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, (contohnya: Bea Materai).

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, (contohnya: Pajak Hotel).

Ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat, oleh karena itu membayar pajak diibaratkan suatu premi asuransi yang harus dibayar untuk memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak masyarakat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang sesuai daya pikul masing-masing orang, untuk mengukur daya pikul, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti pada negara, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali untuk masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

Dalam melakukan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa sistem yaitu:

a. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besar pajak terutang yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Ciri-ciri dalam sistem ini antara lain:

- 1) Wewenang menentukan besar pajak terutang ada pada pemerintah, sedangkan wajib pajak bersifat pasif;

- 2) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak dari pemerintah, misal PBB, PKB.

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang.

Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang menentukan besar pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Melalui sistem ini wajib pajak dimungkinkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, misal : PPh ; BPHTB.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem ini mempunyai ciri-ciri wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).

2.2 Pengertian Wajib Pajak dan Dasar Hukumnya

Orang pribadi yang diwajibkan sebagai wajib pajak di Indonesia adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Dasar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, dan terakhir telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000 disebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan pajak atau pemotong pajak tertentu”. Wajib pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, sudut pandang subjek pajak (pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2000) dan dari sudut pandang kewajiban perpajakannya.

1. Dipandang dari sudut subjek pajak

Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Dipandang dari kewajiban perpajakannya

Wajib Pajak Dalam Negeri

- 1) Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

2.3 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System terdiri dari dua kata berbahasa Inggris, yakni *self* artinya sendiri, dan *to assess* yang berarti menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian *Self Assessment System* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self Assessment System* bisa disebut sistem perpajakan sendiri (*self taxing system*) yaitu sistem pelaksanaan perpajakan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dengan menghitung sendiri besarnya utang pajak kemudian menyetor sendiri utang pajaknya ke kantor pajak atau kantor pos atau kantor persepsi.

Menurut Mardiasmo (2006) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Cirinya antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Kemudian Kesit Bambang Prakosa (2006) mengungkapkan *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri Wajib Pajak sendiri.

Sekarang ini di Indonesia telah diterapkan *self assessment system* yang merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutangnya. Wajib Pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan perpajakan. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *self assessment system* antara lain :

1. Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.4 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Drs. Kustadi Aryanta, 1984:4).

2.5 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999:273). Minimnya tingkat Wajib Pajak yang patuh menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya antusias Wajib Pajak di dalam membayar pajak dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, cara petugas pajak memberikan pelayanan, dan adanya faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengecilkan pajak mereka karena besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada mereka.

2.5.1 Pengetahuan Pajak

Salah satu faktor yang menyebabkan orang kurang antusias di dalam membayar pajak adalah pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Lewis (Ancok 1990:23), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain, khususnya penyimpangan yang besar. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan Negara, dimana Wajib Pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut, dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pajak. Telah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah pengetahuan pajak Wajib Pajak. Pemerintah telah melakukan sosialisasi perpajakan baik melalui spanduk-spanduk, seminar, penyuluhan, melalui media massa dan elektronik. Tujuannya adalah agar Wajib Pajak lebih mudah mengerti mengenai perpajakan dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi yang diberikan tidak hanya sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak tetapi juga penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah.

Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak. Menurut Adam Smith dalam *The Wealth Of Nation* (Presman, 2000:36, dalam Gardina, Triad dan M. Y Dedi Haryanto 2006) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

2.5.2 Persepsi Terhadap Petugas Pajak

Persepsi adalah proses dari seseorang dalam memaksa lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis.

Menurut Ancok (1990: 40) petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan peraturan perpajakan, untuk menumbuhkan persepsi positif terhadap petugas pajak, petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Petugas pajak juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Selain itu fiskus juga harus dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela tanpa paksaan.

Pemberian jasa oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Untuk itu petugas pajak harus memiliki keterampilan untuk dapat memuaskan Wajib Pajak. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki itu adalah kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara-cara yang baik (Budiono, 2000: 101). Pemberian informasi akan lebih mudah diterima bila petugas pajak dipercaya masyarakat. Petugas pajak sebagai seorang yang banyak memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak haruslah dapat menegakkan aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan petugas pajak dipercayai sebagai nara sumber utama mengenai perpajakan sehingga informasi yang dirasakan lebih

akurat oleh Wajib Pajak. Petugas pajak juga harus bersikap simpatik dalam melayani Wajib Pajak, bersifat jujur, adil, serta tidak menyulitkan Wajib Pajak sehingga para Wajib Pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap petugas pajak.

2.5.3 Besarnya Tarif Pajak Yang Dibebankan

Tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak adalah nominal perubahan tarif yang dikenakan demi mengukur perubahan perilaku atas ketaatan pada kewajiban perpajakan.

Menurut Ancok (1990: 40) keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik keadilan horisontal maupun keadilan vertikal sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak. Keadilan horisontal adalah perasaan seseorang bahwa, dia membayar pajak relatif sama jumlahnya dengan orang-orang yang tingkat kekayaannya sama dengan yang dimilikinya. Sedangkan keadilan vertikal adalah perasaan seseorang bahwa, secara proporsional jumlah pajak yang dibayarnya setara dengan proporsional pajak yang dibayar orang lebih kaya atau lebih miskin.

Cukup sering terjadi pembayar pajak merasakan adanya ketidakadilan ini, yakni mereka merasa membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya dia bayar. Perasaan akan besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak inilah yang mengakibatkan minimnya antusias Wajib Pajak terhadap pajak.

2.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak patuh berarti wajib pajak tersebut telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajiban perpajakannya serta melaksanaka hak dan

kewajiban perpajakannya dengan benar (Abimanyu, 2004). Kewajiban dan hak Wajib Pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, dalam arti bahwa apabila Wajib Pajak memang telah melaksanakan perpajakannya maka Wajib Pajak dapat mendapatkan haknya.

Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh, pemerintah memberikan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Wajib Pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan KMK No. 944/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang penentuan Wajib Pajak patuh.

Pendapat kriteria ini pada dasarnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai adanya arti yang berbeda antara Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan Wajib Pajak patuh yang sebenarnya (yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan). Wajib Pajak yang termasuk patuh dalam menyampaikan surat pemberitahuan tersebut ataupun terlambat tetapi telah memohon untuk penundaan penyampaian surat pemberitahuan itu. Wajib Pajak patuh yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tidak hanya dinilai dari ketetapan penyampaian surat pemberitahuan, tetapi juga dilihat dari cara pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Adapun kriteria-kriteria Wajib Pajak patuh yang telah ditetapkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) dalam dua tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan, masa berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan Wajib Pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh dengan syarat Wajib Pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu Wajib Pajak juga harus memenuhi kriteria yang tambahan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP).

- b. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Bagi Wajib Pajak yang dapat memenuhi kriteria tersebut, akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh hak atas restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan dua bulan untuk pajak penghasilan (PPh) tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak. Pengambilan restitusi ini merupakan fasilitas yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang mana Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan kembali restitusi pajak penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) ekspor serta dua bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN) non ekspor.

2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. Penelitian Trias Gardina dan M. Y. Dedi Haryanto (2006) dengan menggunakan sampel sebanyak 65 perusahaan yang berada di Palembang menemukan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sedangkan persepsi terhadap petugas pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Wulandari Sieskawati (2008) dengan penelitiannya menggunakan 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Jambi menemukan bahwa pengetahuan

tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 47,6% sedangkan sisanya 52,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

Theresia (2008) dengan pengujian statistik yang telah dilakukan membuktikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak. Pengetahuan teknis perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar pajak. Pengetahuan manfaat pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar.

Tarjo dan Indra Kusmawati (2006) dengan temuan yang diperoleh yaitu pelaksanaan *Self Assessment System* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik, karena:

- Dalam fungsi menghitung, Wajib Pajak masih banyak yang tidak melakukan perhitungan sendiri pajak terutangya sebaaimana prinsip *Self Assessment System* namun dihitung oleh KPP.
- Dalam fungsi membayar Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangya seblm jatuh tempo akan tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan perhiungannya.
- Untuk fungsi melapor sebagian besar Wajib Pajak melaporkan pajak terutangya diatas tanggal 20.
- Dilihat dari fungsi fiskus untuk fungsi penyuluhan belum terlaksana dengan baik. Untuk fungsi pengawasan masih banyak Wajib Pajak yang

perhitungannya tidak sama dengan perhitungan Fiskus. Sedangkan pada fungsi pelayanan ternyata mereka sering datang ke KPP adalah Wajib Pajak yang fungsi perhitungannya dibantu oleh pihak KPP.

Dalam penelitian ini kesamaan dengan penelitian Tarjo dan Indra Kusumawati (2006) yaitu ingin mengetahui apakah *Self Assessment System* sudah benar-benar diterapkan dengan baik atau belum. Kesamaan penelitian kali ini dengan Trias Gardina dan M. Y Dedi Haryanto (2006), Wulandari Sieskawati (2008), dan Theresia (2008) adalah bahwa variabel bebas yang diamati adalah pengetahuan tentang pajak dan persepsi terhadap petugas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah obyek pajaknya yaitu Wajib Pajak Badan pada BMT dan BPR, study lokasi penelitian yaitu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan variabel terpengaruh yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System* dengan menambahkan variabel bebas yaitu besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan juga terdapat variabel moderating yaitu kriteria Wajib Pajak patuh.

2.8 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Sugiono (2008: 96). Sedangkan menurut Iskandar (2008: 56) Hipotesis adalah suatu pernyataan yang harus diuji kebenarannya karena masih merupakan dugaan sementara. Berdasarkan landasan teori dan aplikasi judul yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

2.8.1. Pengaruh Antara Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesediaan orang membayar pajak dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah.

Secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut, dalam hal ini pemerintah untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak, menurut Adam Smith dalam *The Wealth Of Nation* (Presman, 2000 : 36) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Dari uraian diatas dapat dihipotesakan:

H1 : Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

2.8.2. Pengaruh Antara Persepsi Terhadap Petugas Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Ancok (1990: 40) petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan peraturan perpajakan, untuk menumbuhkan persepsi positif terhadap petugas pajak, petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat

membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Petugas pajak juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Selain itu fiskus juga harus dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela tanpa paksaan.

Pemberian jasa oleh petugas pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, untuk itu petugas pajak harus memiliki ketrampilan untuk dapat memuaskan Wajib Pajak. Dari uraian diatas dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh antara persepsi terhadap petugas pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

2.8.3. Pengaruh Antara Besarnya Tarif Pajak Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak adalah nominal perubahan tarif yang dikenakan demi mengukur perubahan perilaku atas ketaatan pada kewajiban perpajakan. Cukup sering terjadi pembayar pajak merasakan adanya ketidakadilan dalam besar tarif pajak, yakni mereka merasa membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya dia bayar. Perasaan akan besarnya tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak inilah yang mengakibatkan minimnya antusias Wajib Pajak terhadap pajak. Dari uraian tersebut dapat dihipotesakan:

H3 : Terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

2.8.4. Pengaruh Antara Kriteria Wajib Pajak Patuh Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh, akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh hak atas restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan nilai dan dua bulan untuk pajak penghasilan tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak. Pengambilan restitusi ini merupakan fasilitas yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang mana Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan kembali restitusi pajak penghasilan dan satu bulan untuk restitusi pajak pertambahan nilai. Kemudahan yang diberikan ini tentunya akan mendorong Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

H4 : Terdapat pengaruh antara kriteria Wajib Pajak patuh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

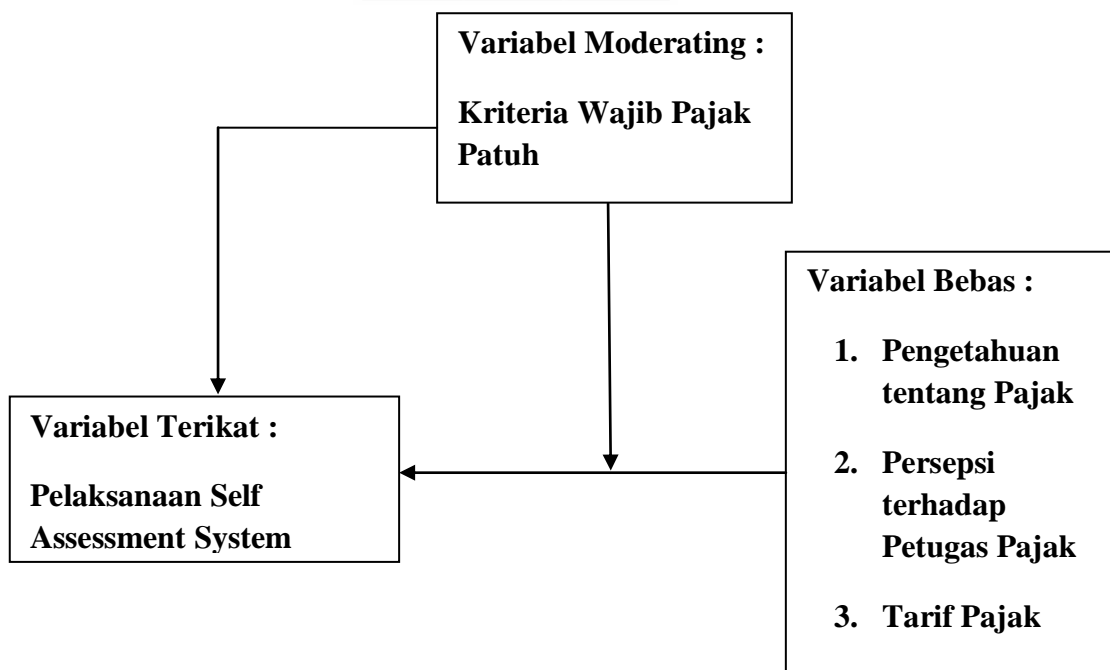
2.8.5. Hubungan Antara Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Kriteria Wajib Pajak Patuh merupakan ketetapan Pemerintah yang telah diatur menurut Keputusan Menteri Keuangan dan dasar hukum

penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan KMK No. 944/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang penentuan Wajib Pajak patuh. Untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh, pemerintah memberikan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Wajib Pajak patuh. Dan karena kriteria Wajib Pajak Patuh ini merupakan ketetapan pemerintah, maka kriteria ini nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu dapat dihipotesakan:

H5 : Hubungan antara faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh.

Gambar Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yaitu BMT dan BPR yang berlokasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 responden dari 50 responden yang diperoleh dari data Bank Indonesia dan Forum Mitra Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa responden yang menolak untuk dimintakan data karena terdapat kebijakan dari pihak manajemen yang tidak mengizinkan untuk diadakannya penelitian pada lembaga tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dibuat oleh peneliti berdasarkan obyek penelitian. Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang diinginkan (Cooper dan William, 1996). Data primer didapat melalui kuisisioner. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti, untuk dimintakan jawabannya dari responden (Syamsul Hadi, 2004). Kuisisioner dalam penelitian ini nantinya akan disebarkan peneliti kepada BMT dan BPR yang ada di Sleman, DIY. Wawancara adalah sebuah interaksi langsung antara peneliti dengan responden (Syamsul Hadi, 2004), serta didukung oleh data

dari KPP Pratama Sleman, DIY yang berupa data penyetoran SPT BMT dan BPR yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman, DIY mulai tahun 2007 sampai tahun 2010.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999:147). Sedangkan menurut Al Ghifari (2003:10), data sekunder adalah data yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga. Ini menunjukkan bahwa data sekunder sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu.

Data sekunder diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak, perpustakaan dan artikel internet guna mendukung data hasil interview dan kuesioner.

3.3 Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan *Self Assessment System*.

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak (X_1). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang

akan tulus membayar pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

- b. Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak (X_2). Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan peraturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi dan bekerja jujur. Jika semua itu telah dilaksanakan dengan baik maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan
- c. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan kepada wajib pajak (X_3). Tarif pajak yang dibebankan oleh Wajib Pajak adalah nominal perubahan tarif yang dikenakan demi mengukur perubahan perilaku atas ketaatan pada kewajiban perpajakan.

3. Variabel Moderating

Variabel moderating (X_4) adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yang termasuk variabel moderating dalam penelitian ini adalah Kriteria Wajib Pajak Patuh yaitu ketetapan yang diberikan pemerintah untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

3.4 Metode Pengujian Instrumen

1) Pengujian Validitas

Uji validitas merupakan proses pengukuran untuk menguji kecermatan butir-butir pertanyaan untuk melakukan fungsi ukurnya, dimana pengujian

dilakukan dengan menggunakan skor pada masing-masing item pada skor totalnya kemudian diolah dengan bantuan program SPSS 17.0.

2) Pengujian Rentabilitas

Uji rentabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama atau menghasilkan hasil-hasil yang konsisten. Pengukuran rentabilitas menggunakan metode Reabilitas Alpha Cronbach karena setiap butir pertanyaan menggunakan skala pengukuran interval. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila memiliki nilai alpha lebih besar dari 60%.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17 (*Statistical Product and Service Solution Version 17*). Untuk menguji hipotesis dan menyatakan kejelasan kekuatan variabel penentu terhadap pelaksanaan Self Assessment System dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji signifikan (pengaruh nyata) variabel independen dan variabel moderating terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas (*P-Value*) pada level of signifikan 5%, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

Model Penelitian:

$$SAS = \alpha + \beta_1 PN + \beta_2 PP + \beta_3 TP + \beta_4 KP + \beta_5 PN.PP.TP.KP + \varepsilon$$

Dimana :

SAS (Y)	: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>
α	: Intercept/konstanta
β	: koefisien
PN (X ₁)	: Pengetahuan Tentang Pajak
PP (X ₂)	: Persepsi terhadap Petugas Pajak
TP (X ₃)	: Tarif Pajak yang dibebankan
KP (X ₄)	: Kriteria Wajib Pajak Patuh
ε	: Random error

2. Analisis Asumsi Klasik

Untuk menguji data yang akurat suatu persamaan regresi sebaiknya terbebas dari asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas:

1) Multikolinieritas

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dalam sebuah regresi. Dampak dari terjadinya multikolinieritas adalah:

- Pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi atau sulit untuk dibedakan.
- Kesalahan standar estimasi cenderung meningkat dengan makin bertambahnya variabel bebas.
- Tingkat signifikan yang digunakan untuk menolak hipotesis nol (H_0) semakin besar.

d. Probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah (kesalahan) semakin besar.

Cara menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF), bebas VIF adalah 5, jika nilai VIF diatas 5 maka terjadi multikolinieritas.

2) Autokorelasi

Autokorelasi secara ilmiah sering terjadi pada data time series. Penyebab dari adanya autokorelasi adalah kesalahan bentuk fungsi yang salah. Data yang disajikan hilang atau kurang dan bias disebabkan oleh adanya transformasi data. Akibat adanya autokorelasi adalah varian residual menjadi tinggi dan uji statistik menjadi tidak valid. Penyelidikan adanya autokorelasi menggunakan tabel Durbin-Watson.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya hubungan antara residual dengan variabel pada hasil regresi sehingga varian residual tidak konstan atau terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel atau bentuk fungsinya, variabel tidak lengkap atau kesalahan dalam mendefinisikan variabel. Cara mengetahui heteroskedastisitas dalam regresi yaitu dengan uji koefisien Rank Spearman.

3.6 Pengujian Hipotesis

Setelah menentukan persamaan regresi dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$$H_{01} : \beta_1 = 0$$

Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$$

Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{02} : \beta_2 = 0$$

Tidak terdapat pengaruh antara persepsi terhadap petugas pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$$

Terdapat pengaruh antara persepsi terhadap petugas pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{03} : \beta_3 = 0$$

Tidak terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$$

Terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{04} : \beta_4 = 0$$

Tidak terdapat pengaruh antara kriteria Wajib Pajak patuh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{a4} : \beta_4 \neq 0$$

Terdapat pengaruh antara kriteria Wajib Pajak patuh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

$$H_{05} : \beta_5 = 0$$

Tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh.

$$H_{a5} : \beta_5 \neq 0$$

Terdapat hubungan antara faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh kriteria Wajib Pajak patuh.

Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai probabilitas *P-Value* dengan taraf signifikan α sebesar 5%).

Ho diterima bila : probabilitas (*P-Value* > taraf signifikan α sebesar 0,05)

Ho ditolak bila : probabilitas (*P-Value* < taraf signifikan α sebesar 0,05)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak badan yaitu BMT dan BPR yang berlokasi di Kabupaten Sleman, sebanyak 50 kuesioner. Berikut data kuesioner yang disebar dan pengembalian kuesioner :

Tabel 4.1

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase %
Kuesioner dibagi	50	100%
Kuesioner yang tidak kembali	13	26%
Kuesioner yang datanya tidak lengkap	2	4%
Sampel penelitian	35	75%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Berdasarkan data diatas dari 50 kuesioner yang disebar dapat diketahui bahwa seluruh kuisoner dapat kembali yaitu sebanyak 37 data, dan kuesioner yang data tidak lengkap sebanyak 2 kuesioner, sehingga total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 35 kuesioner.

4.2. Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang menjadi penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, bentuk usaha, dan penghasilan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
Laki – laki	26	74%
Perempuan	9	26%
Total	35	100%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berjenis kelamin laki - laki, yaitu sebanyak 26 orang (74%) dan sisanya sebesar 9 orang (26%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pimpinan atau manajer pada BMT dan BPR di Sleman mayoritas adalah laki - laki.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Sampel penelitian untuk 35 orang responden berdasarkan jabatan dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 ;

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase %
Pimpinan	20	57.1%
Manager keuangan	10	28.6%
Staf	5	14.3%
Total	35	100.0%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah menjabat sebagai pimpinan yaitu sebanyak 20 orang (57,1%). Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas menjabat sebagai pimpinan, karena pimpinan BMT atau BPR yang menjadi wajib pajak pada badan tersebut.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.4 ;

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase %
SMP	0	0.0%
SMA	3	8.6%
D3	12	34.3%
S1	20	57.1%
S2	0	0.0%
S3	0	0.0%
Total	35	100%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berpendidikan terakhir adalah S1, yaitu sebanyak 20 orang (57,1%). Hal ini menunjukkan responden memiliki pendidikan tinggi, sehingga cukup memiliki pengetahuan tentang pajak.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan lama bekerja ditunjukkan pada tabel 4.5 ;

Tabel 4.5**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja**

Lama bekerja	Jumlah	Persentase %
1 - 5 tahun	15	42.9%
6 - 10 tahun	2	5.7%
> 10 tahun	18	51.4%
Total	35	100.0%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas telah bekerja lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 51,4%. Hal ini menunjukkan responden telah cukup lama bekerja pada BPR dan BMT di Sleman, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola badan keuangan seperti BPR dan BMT.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan jenis usaha ditunjukkan pada tabel 4.6 ;

Tabel 4.6**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis usaha**

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase %
BMT	25	71.4%
BPR	10	28.6%
Total	35	100.0%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki usaha BMT yaitu sebesar 71,4% dan sisanya adalah BPR sebesar 28,6%.

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama operasi

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan lama operasi ditunjukkan pada tabel 4.7 ;

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Operasi

Lama operasi	Jumlah	Persentase %
1 - 5 tahun	15	42.9%
6 - 10 tahun	2	5.7%
> 10 tahun	18	51.4%
Total	35	100.0%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas telah beroperasi lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 51,4%. Hal ini menunjukkan BPR dan BMT di Sleman yang dijadikan sampel penelitian telah beroperasi cukup lama.

4.2.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penghasilan

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan omzet penghasilan ditunjukkan pada tabel 4.8 ;

Tabel 4.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penghasilan

Omzet penghasilan	Jumlah	Persentase %
< Rp.50.000.000	7	20.0%
Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000	3	8.6%
>Rp.100.000.000	25	71.4%
Total	35	100.0%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas omzet BPR dan BMT adalah lebih dari 100 juta yaitu sebesar 71,4%. Hal ini menunjukkan omzet BPR dan BMT di Sleman cukup besar.

4.2.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Produk Usaha

Sampel penelitian untuk 35 responden berdasarkan produk usaha ditunjukkan pada tabel 4.9 ;

Tabel 4.9

Karakteristik Responden Berdasarkan Produk Usaha

Produk Usaha	Unit	Persentase %
Tabungan	35	100.0%
Deposito	35	100.0%
Simpan pinjam	35	100.0%
Kredit	16	45.7%
Mudorobah	26	74.3%
Musyarokah	27	77.1%
Murobahah	19	54.3%
Jasa layanan	20	57.1%

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yaitu BMT dan BPR di Sleman memiliki produk usaha tabungan, deposito, dan simpan pinjam, sedangkan yang memiliki usaha kredit sebesar 45,7%, mudorobah sebesar 74,3%, musyarokah sebesar 77,1%, murobahah sebesar 54,3% dan jasa layanan sebesar 54,3%.

4.3. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian yang terdiri dari pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap

petugas pajak, tarif pajak, kriteria Wajib Pajak patuh dan pelaksanaan *Self Assessment System*. Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju), dan skor tertinggi adalah 4 (Sangat setuju). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian responden terhadap variabel penelitian dapat dilakukan dengan interval sebagai berikut:

Skor penilaian terendah adalah : 1

Skor penilaian tertinggi adalah : 4

$$\text{Interval} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut :

1,00 – 1,75	= Sangat Tidak Setuju
1,76 – 2,50	= Tidak setuju
2,51 – 3,25	= Setuju
3,26 – 4,00	= Sangat setuju

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.10

Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PN	35	1.60	4.00	2.8057	.70874
PP	35	1.38	4.00	2.8163	.52504
TP	35	1.00	4.00	2.7600	.81139
KP	35	1.00	4.00	2.8489	.84549
SAS	35	2.14	3.57	2.9303	.34076

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 35 Wajib Pajak badan di Sleman memiliki penilaian yang tinggi terhadap pengetahuan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,8057 yang berada pada interval 2,51 – 3,25, yang berarti pengetahuan tentang perpajakan berada dalam kriteria yang disetujui oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak dari informasi tentang pajak, mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini serta perubahan peraturan yang ada, sehingga semakin banyak pengetahuan maka masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak, dan masyarakat membayar pajak karena mengetahui bahwa pajak berguna bagi masyarakat.

Hasil deskriptif pada variabel persepsi petugas pajak dapat diketahui tanggapan dari 35 Wajib Pajak badan di Sleman memiliki penilaian yang tinggi terhadap persepsi tentang petugas pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,8163 yang berada pada interval 2,51 – 3,25, yang berarti persepsi terhadap petugas pajak berada dalam kriteria yang disetujui oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena petugas pajak dipercayai sebagai petugas yang jujur dan memiliki pelayanan yang baik sehingga petugas pajak ini telah memiliki citra yang bagus di benak wajib pajak, sebagai petugas yang memiliki kemampuan untuk memotivasi dan mendorong semangat Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 35 Wajib Pajak badan di Sleman memiliki penilaian yang tinggi terhadap tarif pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,76 yang berada pada interval 2,51 – 3,25, yang berarti tarif pajak berada dalam kriteria yang disetujui oleh Wajib Pajak. Artinya

Wajib Pajak telah memahami bagaimana menghitung pajak terutang yang disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan pada SPT dan Wajib Pajak tidak merasa terbebani dengan besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 35 Wajib Pajak di Sleman memiliki penilaian yang tinggi terhadap persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,8489 yang berada pada interval 2,51 – 3,25, yang berarti persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh berada dalam kriteria yang disetujui oleh Wajib Pajak. Artinya bahwa Wajib Pajak sadar bahwa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) harus tepat waktu, dengan mengisi SPT sesuai dengan kenyataannya dan bersedia untuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan kekayaan dan penghasilan yang semestinya kena pajak.

Dari Tabel 4.10 dapat diketahui tanggapan dari 35 Wajib Pajak di Sleman memiliki penilaian yang tinggi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2,9303 yang berada pada interval 2,51 – 3,25, yang berarti pelaksanaan *Self Assessment System* berada dalam kriteria yang disetujui oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak mengetahui siapa yang menghitung pajak terutang, mampu untuk menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan dan mampu mengisi SPT, membayarkannya di kantor pelayanan pajak, mampu mengisi Surat pemberitahuan untuk melaporkan pajak tertutang dan melaporkan pajak terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan karena takut adanya denda.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 35 responden. Dalam pengujian ini koefisien korelasi kritis diperoleh dari tabel distribusi r dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5 % maka r-tabel = 0,3338. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung (untuk r tiap butir pertanyaan terhadap skor total) lebih besar dari nilai r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap Wajib Pajak badan di Sleman dapat dilihat dalam Tabel 4.11 berikut ini ;

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan pajak	Item 1	0,878	0.3338	valid
	Item 2	0,850	0.3338	valid
	Item 3	0,925	0.3338	valid
	Item 4	0,859	0.3338	valid
	Item 5	0,766	0.3338	valid
Sikap petugas	Item 1	0,713	0.3338	valid
	Item 2	0,628	0.3338	valid
	Item 3	0,754	0.3338	valid
	Item 4	0,723	0.3338	valid
	Item 5	0,714	0.3338	valid
	Item 6	0,577	0.3338	valid
	Item 7	0,684	0.3338	valid
	Item 8	0,365	0.3338	valid
Tarif pajak	Item 1	0,846	0.3338	valid
	Item 2	0,858	0.3338	valid
	Item 3	0,863	0.3338	valid
	Item 4	0,874	0.3338	valid
	Item 5	0,920	0.3338	valid
Kriteria Wajib Pajak Patuh	Item 1	0,896	0.3338	valid
	Item 2	0,941	0.3338	valid
	Item 3	0,877	0.3338	valid
	Item 4	0,942	0.3338	valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	Item 5	0,841	0.3338	valid
	Item 6	0,812	0.3338	valid
	Item 7	0,785	0.3338	valid
<i>Self Assessment System</i>	Item 1	0,735	0.3338	valid
	Item 2	0,791	0.3338	valid
	Item 3	0,717	0.3338	valid
	Item 4	0,736	0.3338	valid
	Item 5	0,755	0.3338	valid
	Item 6	0,756	0.3338	valid
	Item 7	0,734	0.3338	valid

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa, bila koefisien korelasi lebih besar dari koefisien korelasi kritis ($r\text{-tabel} = 0,3338$), maka butir instrumen dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir dengan skor total diatas 0,338, maka semua butir yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan tentang pajak, sikap pada petugas pajak, tarif pajak, kriteria Wajib Pajak patuh, dan *Self Assessment System* dapat dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4.2. Uji Keandalan Instrumen Penelitian (Reliability Test)

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $\geq 0,6$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 17 dapat dirangkum seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Crobach	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan pajak	0.908	0.6	Reliabel
Tarif pajak	0.797	0.6	Reliabel
Sikap petugas	0.920	0.6	Reliabel
Kriteria wajib pajak patuh	0.947	0.6	Reliabel
Self Assessment System	0.861	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, Februari 2012

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk kelima variabel lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori diatas maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Analisis Kuantitatif

4.5.1 Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis Regresi Linier Berganda terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya multi korelasi diantara variabel bebas satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain diantara variabel-variabel bebas tersebut dapat dibentuk hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya

Menurut Singih Santoso, untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar 10 maka terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13

Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan pajak	0.307	3.260
Persepsi tentang petugas pajak	0.395	2.535
Tarif Pajak	0.226	4.431
Kriteria wajib pajak Patuh	0.177	5.643
Moderasi PN.PP.TP.KP	0.122	8.218

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, tarif pajak, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh dan interaksinya memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Pengujian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Adapun cara mendeteksi terjadi autokorelasi dalam model analisis regresi dengan menggunakan DW menurut Algifari (1997), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.14

Pengujian Autokorelasi

Kesimpulan	DW	DW Test
Ada autokorelasi	$>1,08$	
Tidak ada kesimpulan	$1,08 - 1,66$	
Tidak ada Autokorelasi	$1,66 - 2,34$	2,252
Tidak ada kesimpulan	$2,34 - 2,92$	
Ada Autokorelasi	$> 2,91$	

Sumber: Algifari (1997). M. Iqbal (1990), data diolah

Hasil analisis regresi seperti pada lampiran diperoleh DW Statistik sebesar 2,252. Dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada pada interval 1,66 sampai dengan 2,34, sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak ada autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dan variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan uji koefisien *Rank Spearman*.

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di tampilkan pada

Tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15
Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Korelasi Rank Spearman	p value	Keterangan
Pengetahuan pajak	-0.015	0.934	Tidak terjadi heterokedasitas
Persepsi tentang petugas pajak	0.054	0.758	Tidak terjadi heterokedasitas
Tarif Pajak	0.011	0.950	Tidak terjadi heterokedasitas
Kriteria wajib pajak Patuh	-0.047	0.790	Tidak terjadi heterokedasitas
Moderasi PN.PP.TP.KP	0.057	0.744	

Sumber : Data primer diolah, 2012

Dari tabel 4.15 diatas dapat diketahui seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, tarif pajak, persepsi tentang kriteria Wajib Pajak patuh dan interaksinya memiliki nilai probabilitas diatas 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda Moderasi

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*software*) komputer program SPSS 17. Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel pengetahuan tentang pajak (X_1), tarif pajak (X_2), persepsi tentang petugas pajak (X_3), kriteria Wajib Pajak patuh (X_4), dan interaksi (PN.PP.TP.KP) yang mempengaruhi *Self Assessment System* dilihat dalam tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Moderasi

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas	Keterangan
Konstanta	-0.060	-0.143	0.887	Tidak Signifikan
Pengetahuan pajak	0.195	3.858	0.001	Signifikan
Persepsi tentang petugas pajak	0.170	2.824	0.008	Signifikan
Tarif Pajak	0.301	5.850	0.000	Signifikan
Kriteria wajib pajak patuh	0.418	7.487	0.000	Signifikan
Interaksi PN.PP.TP.KP	-0.001	-0.557	0.582	Tidak Signifikan
F hitung	53,748			
Adjusted R ²	0,886			
Multiple R	0,950			

Sumber : Data hasil regresi, 2012

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 PN + \beta_3 TP + \beta_4 KP + \beta_5 PP.PN.TP.KP$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi *Self Assessment System* sebagai berikut :

$$Y = -0,060 + 0,195PP + 0,170PN + 0,301TP + 0,418KP - 0,001PP.PN.TP.KP \dots (1)$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Self Assessment System* maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta (Koefisien a)

Nilai konstanta sebesar -0,060 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi *Self Assessment System*, maka *Self Assessment System* akan sama dengan -0,060. Karena berdasarkan teori, *Self Assessment System* merupakan kebijakan dari Pemerintah yang wajib dilaksanakan dan nilai konstanta tidak boleh kurang dari 0, maka nilai konstanta dapat dinolkan dan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi *Self Assessment System* menjadi sebagai berikut :

$$Y = 0 + 0,195PP + 0,170PN + 0,301TP + 0,418KP - 0,001PP.PN.TP.KP .. (2)$$

b. Koefisien Pengetahuan Tentang Pajak (b₁)

Pengetahuan tentang pajak (PP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Self Assessment System*, dengan koefisien regresi sebesar 0,195. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Pengetahuan tentang pajak dan *Self Assessment System* menunjukkan hubungan yang searah. Pengetahuan tentang pajak semakin tinggi mengakibatkan *Self Assessment System* juga akan tinggi, begitu pula dengan Pengetahuan tentang pajak yang semakin rendah maka *Self Assessment System* akan menurun.

c. Koefisien Persepsi Tentang Petugas Pajak (b₂)

Persepsi tentang petugas pajak (PP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Self Assessment System*, dengan koefisien regresi sebesar 0,170. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara

Persepsi tentang petugas pajak dan *Self Assessment System* menunjukkan hubungan yang searah. Persepsi tentang petugas pajak semakin tinggi mengakibatkan *Self Assessment System* juga akan meningkat, begitu pula dengan Persepsi tentang petugas pajak yang semakin rendah maka *Self Assessment System* akan menurun.

d. Koefisien Tarif Pajak (b₃)

Tarif pajak (TP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Self Assessment System*, dengan koefisien regresi sebesar 0,301. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara tarif pajak dan *Self Assessment System* menunjukkan hubungan yang searah. Hal ini menunjukkan semakin sesuai tarif pajak mengakibatkan *Self Assessment System* juga akan tinggi, begitu pula dengan tarif pajak yang semakin rendah maka *Self Assessment System* akan menurun.

e. Koefisien Persepsi Terhadap Kriteria Wajib Pajak Patuh (b₄)

Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh (KP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap *Self Assessment System*, dengan koefisien regresi sebesar 0,418. Dengan adanya pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh dan *Self Assessment System* menunjukkan hubungan yang searah. Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh yang semakin tinggi mengakibatkan *Self Assessment System* juga akan meningkat, begitu pula dengan Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh yang semakin rendah maka *Self Assessment System* akan menurun.

f. Koefisien Interaksi (b_5)

Interaksi antara pengetahuan pajak, persepsi petugas pajak, tarif pajak dan kriteria Wajib Pajak patuh mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *Self Assessment System*, dengan koefisien regresi sebesar -0,001. Dengan adanya pengaruh yang negatif ini, berarti bahwa antara interaksi variabel bebas dengan kriteria Wajib Pajak patuh terhadap *Self Assessment System* menunjukkan hubungan yang negatif. Semakin tinggi interaksi yang terjadi maka *Self Assessment System* semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah interaksi yang terjadi maka *Self Assessment System* akan semakin tinggi.

4.5.3 Uji Bersama - sama (Uji F)

Berdasarkan Tabel 4.16 didapat F_{hitung} sebesar 53,748 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa $P_{value} < 0,05$. Karena $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, tarif pajak, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh dan interaksinya secara bersama - sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Self Assessment System*.

4.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi dari nol sampai satu. Semakin mendekati nol besar koefisien determinasi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin besar pula

pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dari Tabel 4.16 juga dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,886. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,886, maka dapat diartikan bahwa 88,6% *Self Assessment System* dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak, tarif pajak, persepsi tentang petugas pajak, persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh dan interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5.5 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

a. Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan tentang pajak (PN)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak (PP) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,858 dan probabilitas sebesar 0,001 yang berarti $P\ value < 0,05$ yaitu $0,001 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan tentang pajak secara signifikan terhadap *Self Assessment System*, **dengan demikian hipotesis pertama terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wulandari Sieskawati (2008)) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Lewis (Anchok 1990 : 23), pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan orang lain, khususnya penyimpangan yang besar. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan Negara, dimana Wajib Pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Secara teoritis, untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut, dalam hal ini pemerintah untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak, menurut Adam Smith dalam *The Wealth Of Nation* (Presman, 2000 : 36) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu.

b. Pengujian t hitung pada Variabel Persepsi tentang petugas pajak (PP)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang petugas pajak (PP) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 2,824 dan probabilitas sebesar 0,008 yang berarti ***P value* < 0,05** yaitu $0,008 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel persepsi tentang petugas pajak, **dengan demikian hipotesis kedua terbukti**. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Sieskawati (2008) yang menemukan bahwa persepsi terhadap petugas pajak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pesepsi terhadap petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* hal ini mungkin disebabkan karena petugas pajak dipercayai sebagai nara sumber utama mengenai perpajakan sehingga informasi yang dirasakan lebih akurat oleh Wajib Pajak. Pemberian jasa oleh petugas pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib Pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, untuk itu petugas pajak harus memiliki ketrampilan untuk dapat memuaskan Wajib Pajak.

c. Pengujian t hitung pada Variabel Tarif pajak (TP)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X_2) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 5,850 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti $P\ value < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel tarif pajak secara signifikan terhadap *Self Assessment System*, **dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.**

Hal ini disebabkan karena tarif pajak yang ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat, pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian dan telah efisien dari jumlah penghasilan Wajib Pajak, karena besarnya jumlah pajak sudah sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan sehingga sudah sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat dan masyarakat merasa tidak berat dalam membayar tarif pajak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kemauan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,

karena tarif pajak yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat.

d. Pengujian t hitung pada Variabel Persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh (KP)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh (X_3) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 7,487 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti $P\ value < 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh secara signifikan terhadap *Self Assessment System* , **dengan demikian hipotesis keempat terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Trias Gardina dan M. Y. Dedi Haryanto (2006) yang menyatakan bahwa persepsi kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak pada 65 perusahaan di Palembang

Persepsi kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System* karena Wajib Pajak menilai terlalu banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan untuk masing – masing kriteria cukup lama sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhinya. Dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh ini, Wajib Pajak menginginkan agar kriteria tersebut lebih disederhanakan lagi. Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh, akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh hal atas restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan nilai dan dua bulan untuk pajak penghasilan

tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak. Pengambilan restitusi ini merupakan fasilitas yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang mana Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan kembali restitusi pajak penghasilan dan satu bulan untuk restitusi pajak pertambahan nilai. Kemudahan yang diberikan ini tentunya akan mendorong meningkatkan *Self Assessment System*.

e. Pengujian t hitung pada Variabel Interaksi Faktor-Faktor dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel interaksi faktor-faktor *Self Assessment System* dengan persepsi terhadap kriteria Wajib Pajak patuh (PN.PP.TP.KP) terdapat nilai t_{hitung} sebesar -0,557 dan probabilitas sebesar 0,582 yang berarti $P\ value > 0,05$ yaitu $0,582 > 0,05$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimoderasi oleh variabel kriteria Wajib Pajak patuh, **dengan demikian hipotesis kelima tidak terbukti.**

Hasil ini berarti kriteria Wajib Pajak patuh bukan variabel yang memoderasi hubungan antara faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak dengan *Self Assessment System*. Hal ini disebabkan karena kriteria Wajib Pajak patuh yang langsung akan meningkatkan *Self Assessment System* bukan sebagai variabel moderasi. Dari kriteria Wajib Pajak patuh yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, point-point yang memberatkan adalah penyelenggaraan pembukuan, dan mendapatkan opini audit wajar tanpa

pengecualian. Sementara BMT dan BPR yang ada di kabupaten Sleman ini merupakan perusahaan pembiayaan yang sangat patuh dalam melakukan pembukuan dan memiliki kecermatan di dalam menyampaikan laporan keuangannya. Masing-masing BMT dan BPR telah menggunakan jasa auditor dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga tidak ada pertimbangan yang berarti dalam kriteria yang memberatkan Wajib Pajak patuh. Hal inilah yang menyebabkan kriteria Wajib Pajak patuh akan berpengaruh langsung terhadap *Self Assessment System* bukan sebagai variabel yang memoderasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Secara serempak variabel pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak, tarif pajak yang dibebankan, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh, dan interaksinya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*, hal ini dibuktikan dengan hasil *P value* yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel bebas tersebut terhadap *Self Assessment System* sebesar 88,6% sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Secara parsial variable-variabel pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak, tarif pajak yang dibebankan, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System*, sedangkan kriteria pajak wajib pajak patuh tidak memoderasi hubungan antara faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dengan *Self Assessment System*.

5.2 Saran

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah atau wajib pajak dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ;

1. Hendaknya pemerintah atau Dirjen Pajak memberikan informasi tentang pajak kepada masyarakat lebih diintensifkan, misalnya melalui surat kabar, seminar perpajakan, media elektronik serta petugas pajak. Karena semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu pemerintah hendaknya merealisasikan dana pajak untuk pembangunan yang memberikan manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat, misalnya pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja/padat karya, dan pemberian asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, sehingga mampu mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Hendaknya petugas pajak meningkatkan pelayanan pajak dengan bersikap simpatik dalam melayani wajib pajak, bersifat jujur, adil serta tidak menyulitkan wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki persepsi yang positif terhadap petugas pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian yang sama hendaknya didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak dengan menambah variabel pendukung misalnya faktor eksternal (tingkat pendapatan wajib pajak/income perkapita, demografi, dan lain – lain).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, *Wajib Pajak Belum Patuh*, 2004, <http://fiscal.depkeu.go.id/pernik.html>.
- Algifari, *Analisis Statistik Untuk Bisnis dan Regresi dan Nonparametik*, BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Aryanta, Kustiadi, *Sistem dan Peraturan Perpajakan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Bambang Prakosa, Kesit, *Hukum Pajak*, Edisi Pertama, Ekonisia, Yogyakarta, 2006.
- Budiono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000.
- Damayanti, T.W, *Pelaksanaan Sels Assessment System Menurut Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Salatiga)*, Jurnal ekonomi dan bisnis (dian ekonomimi), Vol.X, No.1, Maret 2004: 109-128.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djamaludin, Ancok, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1990.
- Erly, Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, 2005.
- Gardina, Trisia dan M.Y. Dedi Haryanto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Modus, Volume 18 (1): Hal 10-28, 2006.
- Hadi, Syamsul, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Yogyakarta, Ekonisia, 2006.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi, 2003.

Rusmiyati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap Implementasi Self Assessment System Pajak Penghasilan (Suatu Study di Pekalongan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Seiskawati, Wulandari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak*. Universitas Kristen Petra 2008.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Erasco, Bandung, 1990.

Tarjo dan Indra K, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. JAAI, Vol 10, No. 1, Juni 2006: 144-160.

-----, 27 Febuari 2004, Kepatuhan Wajib Pajak Rendah, Bisnis Indonesia, <http://Klikpajak.com/artikel>.

-----, 7 Maret 2011, 5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh, Kompas, <http://Kompas.com/artikel..>


-----, Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, <http://www.infopajak.com>.

-----, PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh, <http://www.ortax.org>

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.google.com/perpajakandiindonesia/com>

LAMPURAN



The watermark features the ITS logo, which includes the letters 'S' and '5' in a stylized arrangement. Text elements include 'ISLAM' at the top, 'INDONESIA' on the right side, and the Indonesian name 'Institut Teknologi Sepuluh Nopember' at the bottom. Below the name is the Arabic phrase 'إتخا الأمتة الأندونيسة'.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 410/DEK/10/Div.SDM/XII/2011
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

29 Desember 2011

Kepada Yth.
Pimpinan BMT/BPR
Di Sleman

.Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Rizka Amellia
No. Mahasiswa : 08 312 020
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Magelang KM.14,5 Panasan Gg.Kendang No.9,Murangan,Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi judul. **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assessment System Yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus Pada BMT Dan BPR Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) ”**

Dosen Pembimbing : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan ,

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA
NIK : 88 312 0104



No. : 04/FORMES/II/2012
Hal : **Pengantar Penelitian**
Lamp. : -

Kepada Yth.

Pengurus BMT Anggota/Calon Anggota Puskopsyah FORMES

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat kepada kita, semoga hidayah –Nya selalu melimpah kepada kita sehingga kita dapat terus berjuang menegakkan Dienul Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Sehubungan dengan surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Islam Indonesia.Fak Ekonomi mengenai Penyusunan Skripsi dari Mahasiswa

Nama	: Rizka Amellia
No Mahasiswa	: 08.312.020
Jurusan	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assesment System Yang Dimoderasi oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh
Dosen Pembimbing	: Kesit Bambang Prakosa, Drs.,M.Si

Maka dengan ini Puskopsyah Formes menghimbau kepada BMT Anggota/Calon Anggota Puskopsyah FORMES untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Sleman, 10 Februari 2012

Puskopsyah Formes



Fitria ASA, SE

Pengelola

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang mengirim kuisioner ini

Nama : Rizka Amellia
No. Mahasiswa : 08312020
Posisi Sebagai : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII

Mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mendukung penelitian dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Self Assessment System Yang Dimoderasi Oleh Kriteria Wajib Pajak Patuh (Studi Kasus Pada BMT dan BPR di Sleman, Yogyakarta)”** dengan mengisi kuisioner terlampir.

Saya menyadari bahwa waktu merupakan hal yang berharga untuk Bapak/Ibu, namun saya juga yakin bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari responden. Data yang saya butuhkan hanya merupakan persepsi Bapak/Ibu, tidak ada maksud apa-apa dibalik pengisian kuisioner kecuali guna penelitian ilmiah yang sedang saya teliti. Selanjutnya data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Kesit Bambang Prakosa, Drs.,M.Si

Rizka Amellia

I. Identitas Responden

- Nama BMT/BPR** : (boleh tidak diisi)
- Nama Responden** :
- Jabatan Responden** : a. Pimpinan b. Manager Keuangan
c. Staff
- Lama Bekerja** : a. 1-3 Tahun b. 4-6 Tahun
c. > 7 Tahun
- Jenis Kelamin** : a. Pria b. Wanita
- Tingkat Pendidikan** : a. SMP b. SMA
c. D3 d. S1
e. S2 f. S3
- Jenis Usaha** : a. BMT
b. BPR
- Produk Usaha** : a. Tabungan b. Deposito
(boleh pilih lebih dari 1) c. Simpan Pinjam d. Kredit
e. Mudorobah f. Musyarokah
g. Murobahah h. Jasa Layanan
- Lama Operasi BMT/BPR** : a. 1-5 Tahun b. 6-10 Tahun
c. > 10 Tahun
- Omzet Penghasilan/Thn** : a. < Rp 50.000.000
b. Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000
c. > Rp 100.000.000

II. Tanggapan Responden

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai diantara alternatif yang ada, dengan memberikan tanda silang (X).

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Bagian A – Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya mengerti mengenai tujuan pemerintah memungut pajak dan cukup mendapat informasi tentang pajak.				
2. Saya memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.				
3. Saya mengetahui jika ada perubahan yang terjadi pada peraturan-peraturan perpajakan.				
4. Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna untuk saya dan masyarakat.				
5. Saya juga mengerti akan sanksi terhadap kelalaian Wajib Pajak yang disengaja ataupun tidak disengaja.				

Bagian B – Persepsi Terhadap Petugas Pajak

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Tanpa biaya tambahan, kecepatan pelayanan dari pemerintah tidak terjamin				
2. Saya mau membayar pajak lebih banyak jika pelayanan pemerintah ditingkatkan.				
3. Sikap petugas pajak yang simpatik akan memudahkan proses pembayaran pajak.				
4. Sikap petugas pajak yang jujur akan memotivasi pembayaran pajak.				
5. Saya sering kecewa dengan pelayanan petugas pajak.				
6. Saya tahu bahwa ada petugas pajak yang menerima suap.				
7. Kepuasan terhadap petugas pajak akan mendorong saya lebih bersemangat dalam membayar pajak.				
8. Citra petugas pajak sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan.				

Bagian C – Tarif Pajak

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Saya mengerti bagaimana cara menghitung Pajak Terutang saya (BMT/BPR).				

2. Penghitungan tarif pajak saat ini sudah sangat efisien dari jumlah penghasilan Wajib Pajak.				
3. Besar/kecilnya jumlah pajak terutang badan tergantung pada penghasilan yang saya laporkan pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.				
4. Saya tidak pernah terbebani dengan besarnya nominal pajak yang harus saya bayar.				
5. Semakin saya mengerti cara menghitung pajak yang harus saya bayar, semakin membuat saya patuh.				

Bagian D – Kriteria Wajib Pajak Patuh

PERTANYAAN	STS	TS	S	SS
1. Sebagai warga Negara yang baik, saya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.				
2. Saya mengisi SPT sesuai dengan kenyataan.				
3. Saya menyampaikan SPT Masa tepat waktu.				
4. Saya tidak pernah dengan sengaja, tidak melaporkan kekayaan dan penghasilan yang semestinya kena pajak.				
5. Saya akan membayar pajak tepat waktu walaupun saya tidak diberi piagam penghargaan oleh Dirjen				

Pajak.				
6. Saya memenuhi kewajiban pajak saya tepat waktu karena kesadaran saya sendiri.				
7. Saya telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				

Bagian E – Pelaksanaan Self Assessment System

1. Penghitungan pajak terutang dilakukan oleh: a. Intern (Staff) b. Fiskus (Aparat Pajak) c. Konsultan Pajak				
2. Saya mampu untuk menghitung sendiri pajak yang harus saya bayar.				
3. Saya mampu mengisi sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).				
4. Saya menghitung dan membayarkan sendiri pajak terutang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).				
5. Saya telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan pajak terutang.				
6. Saya melaporkan pajak terutang melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).				
7. Saya melaporkan pajak terutang bukan karena takut adanya denda.				

DAFTAR RESPONDEN

BMT	BPR
BMT Mitra Usaha Mulia	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi
BMT Mitra Usaha Insani	PT. BPR Duta Gama
BMT Mitra Reksa Bhakti	PT. BPR Nusumma Tempel
BMT Insan Mandiri	PT. BPR Danagung Bakti
BMT Prima Artha	PT. BPR Redjo Bhawono
BMT Mentari	PT. BPR Shinta Daya
BMT Mitra Usaha Umat	PD. BPR Bank Sleman
BMT Surya Harapan Umat	PT. BPR Arta Agung
BMT Bina Ummah	PT. BPR Berlian Bumi Arta
BMT Mandiri	PT. BPR Artajaya Bhaktimulia
BMT Citra Buana Syari'ah	PT. BPR Danagung Abadi
BMT Al Ikhwan	PT. BPR Restu Mandiri Makmur
BMT Artha Mulia Insani	PT. BPR Danagung Ramulti
BMT Surya Amanah	PT. BPR Bhumikarya Pala
BMT Subbulussalam	PT. BPR Wijayamulya Santosa
BMT Agawe Makmur	PT. BPR Danamas Prima
BMT Sejahtera	PT. BPR Artha Mlati Indah
BMT Al Barokah	PT. BPR Arta Yogyakarta
BMT Kamilah	PT. BPR Sindu Adi
BMT Kube 019	PT. BPR Mlati Pundi Artha
BMT Kube 020	PT. BPR Panca Arta Monjali
BMT Bina Sejahtera	PT. BPR Karangwaru Pratama
BMT Bina Insan Mandiri	PT. BPRS Formes
BMT Kube 017	PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera
BMT Al-Kautsar	PT. BPRS Bangun Drajat Warga

DAFTAR SAMPLE PENELITIAN

BMT	BPR
BMT Mitra Usaha Mulia	PT. BPRS Formes
BMT Mitra Usaha Insani	PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera
BMT Mitra Reksa Bhakti	PT. BPRS Bangun Drajat Warga
BMT Insan Mandiri	PT. BPR Nusumma Tempel
BMT Prima Artha	PT. BPR Redjo Bhawono
BMT Mentari	PT. BPR Berlian Bumi Arta
BMT Mitra Usaha Umat	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi
BMT Surya Harapan Umat	PT. BPR Danagung Abadi
BMT Bina Ummah	PT. BPR Danagung Ramulti
BMT Mandiri	PT. BPR Arta Yogyakarta
BMT Citra Buana Syari'ah	
BMT Al Ikhwan	
BMT Artha Mulia Insani	
BMT Surya Amanah	
BMT Subbulussalam	
BMT Agawe Makmur	
BMT Sejahtera	
BMT Al Barokah	
BMT Kamilah	
BMT Kube 019	
BMT Kube 020	
BMT Bina Sejahtera	
BMT Bina Insan Mandiri	
BMT Kube 017	
BMT Al-Kautsar	

REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	Lab	Lam	JK	Pend	JU	Lam	Omz	Pengetahuan					Petugas Pajak								Tarif Pajak										
								PW1	PW2	PW3	PW4	PW5	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5						
1	1	2	1	4	1	1	1	2	2	2	3	4	2,60	1	1	3	3	3	4	4	3	3	2	2,63	2	1	3	1	2	1,80	
2	2	2	1	4	1	1	3	4	3	4	4	3	4	3,60	1	3	3	3	2	2	3	3	3	2,50	3	3	4	3	4	3,40	
3	1	3	1	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3,00	2	2	3	4	3	2	2	3	3	3	2,75	3	2	3	3	3	2,80	
4	1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	2	4	4	3	1	3	3	3	2	2,63	3	3	2	3	3	2,80	
5	3	3	1	3	1	3	1	4	4	4	4	4	4,00	1	1	3	4	4	4	4	4	4	3	3,00	4	1	4	1	3	2,60	
6	3	3	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,88	3	3	3	3	3	3,00	
7	2	3	1	4	2	3	3	2	2	3	3	3	2,60	2	2	3	3	2	4	4	3	3	2	2,63	3	3	2	2	3	2,60	
8	2	2	1	4	2	1	3	2	2	2	2	2	2,00	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	2	3	2	3	2,60	
9	2	2	2	4	1	1	3	4	4	4	4	4	4,00	3	3	2	3	4	2	4	2	3	3	2,88	2	4	2	3	2	2,60	
10	3	1	1	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	
11	1	3	1	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3,20	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	2,75	4	4	4	3	4	3,80	
12	1	2	1	4	1	1	1	3	3	4	3	3	3,20	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2,75	2	1	1	2	2	1,60	
13	2	2	1	4	1	1	3	2	1	2	1	2	1,60	3	3	4	3	4	4	3	3	3	2	2,88	4	4	4	4	4	4,00	
14	1	3	1	3	1	3	2	2	3	3	2	4	2,80	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3,38	3	3	4	3	4	3,40
15	1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	2	3	2	2	2,40	
16	1	3	1	3	1	3	1	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,75	3	4	4	4	4	3,80	
17	3	3	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	1,2,60	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	2,50	4	3	3	4	3	3,40	
18	2	3	1	4	1	3	3	2	2	2	2	2	2,00	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1,38	2	2	2	2	2	2,00	
19	2	2	1	4	1	1	3	2	3	3	2	3	2,60	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3,38	4	4	4	3	4	3,80	
20	2	2	2	4	1	2	3	3	3	4	4	4	3,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	2	3	2	2	2,20	
21	1	1	1	3	2	1	3	2	3	3	2	3	2,60	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2,50	1	2	1	1	2	1,40	
22	1	3	1	4	2	3	3	1	2	1	2	2	1,60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	4	3	4	3	3	3,40	
23	1	2	2	4	1	1	1	2	3	3	2	3	2,60	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2,63	3	4	3	4	4	3,60	
24	1	2	2	4	1	1	3	2	2	2	2	2	2,00	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3,50	3	3	4	3	4	3,40	
25	1	3	1	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2,00	
26	1	3	2	3	1	3	3	3	3	3	2	4	3,00	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3,38	3	2	2	2	2	2,20	
27	1	3	2	3	1	3	1	2	3	3	2	3	2,60	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3,50	2	2	2	2	2	2,00	
28	3	3	1	2	1	3	3	2	2	2	2	1	1,80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	2	2,00	
29	1	3	2	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2,00	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3,00	1	1	1	1	1	1,00	
30	1	2	1	4	2	1	3	4	4	4	4	4	4,00	4	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2,88	3	3	4	3	4	3,40	
31	2	2	2	4	1	2	3	3	3	2	2	2	2,40	2	2	2	1	3	3	1	2	2	2	1,88	1	2	2	2	2	1,80	
32	1	1	1	3	2	1	3	3	3	3	2	3	3,00	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2,50	2	2	2	2	2	2,00	
33	1	3	1	4	2	3	3	1	2	1	2	2	1,60	3	3	1	3	3	2	3	3	3	2	2,50	3	3	3	3	4	3,20	
34	1	2	2	4	1	1	1	2	3	3	2	3	2,60	2	1	2	2	2	4	4	4	4	4	2,63	3	3	3	3	3	3,00	
35	2	2	1	4	1	1	3	4	4	4	4	4	3,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	4	4	4	4	3,60	

REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	Kriteria Wajib Pajak Patuh							Self Assessment System								
	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	KW7	SAS1	SAS2	SAS3	SAS4	SAS5	SAS6	SAS7		
1	4	4	4	4	4	4	3	3,86	2	2	4	2	4	4	4	3,14
2	3	3	3	4	3	3	3	3,14	3	4	4	3	3	4	3	3,43
3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3,00
4	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3,00
5	2	2	2	2	1	1	1	1,57	3	3	4	3	2	2	1	2,57
6	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3,00
7	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	2	3	2	3	3	3	2,57
8	2	3	3	3	3	3	3	2,86	3	3	2	3	3	3	3	2,86
9	3	4	4	4	2	4	4	3,57	3	3	4	3	4	3	4	3,43
10	3	3	3	3	3	3	3	3,00	4	4	4	4	3	3	3	3,57
11	3	4	4	4	4	4	4	3,86	3	4	3	3	4	4	4	3,57
12	1	1	2	1	2	3	3	1,86	2	2	3	2	1	2	3	2,14
13	4	3	4	4	4	3	2	3,43	3	4	2	3	4	4	3	3,29
14	1	3	2	2	4	2	1	2,14	3	4	3	3	2	3	2	2,86
15	1	1	2	1	2	2	3	1,71	3	3	3	3	1	2	3	2,57
16	1	1	1	1	1	2	1	1,14	3	3	3	3	3	2	2	2,71
17	2	3	4	3	2	4	3	3,00	3	4	2	2	3	3	4	3,14
18	4	4	4	4	4	4	4	4,00	2	2	2	2	4	4	4	2,86
19	3	3	4	2	3	2	3	2,86	3	4	3	3	3	3	3	3,14
20	3	3	4	3	3	3	3	3,14	3	3	4	3	3	3	3	3,14
21	4	4	4	4	4	4	4	4,00	3	3	3	2	3	3	3	2,86
22	3	3	2	3	3	3	3	2,86	3	4	2	3	3	3	3	3,00
23	3	3	3	3	2	3	2	2,71	3	4	3	3	3	3	3	3,14
24	4	3	3	4	3	3	4	3,43	3	4	2	3	4	4	4	3,43
25	4	4	4	4	4	4	4	4,00	2	2	3	3	3	4	4	3,00
26	3	3	3	3	3	2	3	2,86	3	2	3	3	3	3	3	2,86
27	3	3	3	3	2	3	2	2,71	3	2	3	3	3	3	3	2,86
28	2	2	2	2	2	3	3	2,29	2	2	2	2	2	2	3	2,14
29	4	4	4	4	4	4	4	4,00	3	2	3	2	3	3	3	2,71
30	1	1	2	1	1	1	2	1,29	3	3	3	3	3	2	3	2,86
31	4	4	4	4	4	4	4	4,00	2	3	3	3	3	3	3	2,86
32	3	3	3	3	2	2	2	2,57	3	2	4	2	3	3	3	2,71
33	3	3	2	3	3	3	2	2,71	3	3	2	2	3	3	3	2,71
34	1	2	1	2	2	4	3	2,14	2	3	3	2	2	3	3	2,57
35	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3	3	3	3	3	2	2	2,71



Correlations

Correlations

		PN1	PN2	PN3	PN4	PN5	Total
PN1	Pearson Correlation	1	.749**	.789**	.691**	.517**	.878**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PN2	Pearson Correlation	.749**	1	.779**	.657**	.486**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PN3	Pearson Correlation	.789**	.779**	1	.710**	.680**	.925**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PN4	Pearson Correlation	.691**	.657**	.710**	1	.601**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
PN5	Pearson Correlation	.517**	.486**	.680**	.601**	1	.766**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson Correlation	.878**	.850**	.925**	.859**	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	5

Correlations

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	Total
PP1	Pearson Correlation	1	.737**	.474**	.289	.397*	.242	.246	.047	.713**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.092	.018	.161	.154	.790	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP2	Pearson Correlation	.737**	1	.374*	.493**	.374*	-.008	.155	-.095	.628**
	Sig. (2-tailed)	.000		.027	.003	.027	.962	.374	.587	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP3	Pearson Correlation	.474**	.374*	1	.600**	.527**	.305	.345*	.200	.754**
	Sig. (2-tailed)	.004	.027		.000	.001	.075	.042	.250	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP4	Pearson Correlation	.289	.493**	.600**	1	.620**	.194	.538**	.075	.723**
	Sig. (2-tailed)	.092	.003	.000		.000	.264	.001	.669	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP5	Pearson Correlation	.397*	.374*	.527**	.620**	1	.283	.450**	.045	.714**
	Sig. (2-tailed)	.018	.027	.001	.000		.100	.007	.799	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP6	Pearson Correlation	.242	-.008	.305	.194	.283	1	.607**	.433**	.577**
	Sig. (2-tailed)	.161	.962	.075	.264	.100		.000	.009	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP7	Pearson Correlation	.246	.155	.345*	.538**	.450**	.607**	1	.451**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.154	.374	.042	.001	.007	.000		.006	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
PP8	Pearson Correlation	.047	-.095	.200	.075	.045	.433**	.451**	1	.365*
	Sig. (2-tailed)	.790	.587	.250	.669	.799	.009	.006		.031
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson Correlation	.713**	.628**	.754**	.723**	.714**	.577**	.684**	.365*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.031	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.797	8



**Reliability
Correlations**

Correlations

		TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	Total
TP1	Pearson Correlation	1	.563**	.779**	.616**	.748**	.846**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TP2	Pearson Correlation	.563**	1	.570**	.871**	.730**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TP3	Pearson Correlation	.779**	.570**	1	.596**	.807**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TP4	Pearson Correlation	.616**	.871**	.596**	1	.729**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
TP5	Pearson Correlation	.748**	.730**	.807**	.729**	1	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson Correlation	.846**	.858**	.863**	.874**	.920**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	5

Correlations

		Correlations					
		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
KP1	Pearson Correlation	1	.852**	.797**	.904**	.715**	.573**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KP2	Pearson Correlation	.852**	1	.827**	.927**	.796**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KP3	Pearson Correlation	.797**	.827**	1	.795**	.673**	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KP4	Pearson Correlation	.904**	.927**	.795**	1	.742**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
KP5	Pearson Correlation	.715**	.796**	.673**	.742**	1	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	35	35	35	35	35	35
KP6	Pearson Correlation	.573**	.713**	.600**	.723**	.619**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	35	35	35	35	35	35
KP7	Pearson Correlation	.588**	.612**	.647**	.633**	.577**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson Correlation	.896**	.941**	.877**	.942**	.841**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		KP7	Total
KP1	Pearson Correlation	.588**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
KP2	Pearson Correlation	.612**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
KP3	Pearson Correlation	.647**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
KP4	Pearson Correlation	.633**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000

	N	35	35
KP5	Pearson Correlation	.577**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
KP6	Pearson Correlation	.762**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
KP7	Pearson Correlation	1	.785**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	35	35
Total	Pearson Correlation	.785**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

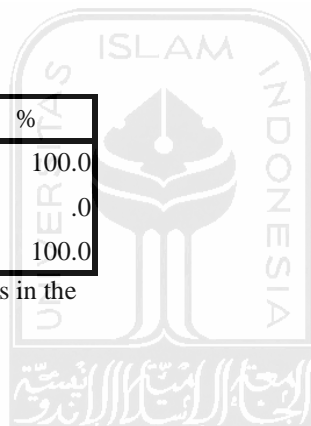
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.947	7



Correlations

Correlations

		SAS1	SAS2	SAS3	SAS4	SAS5	SAS6
SAS1	Pearson Correlation	1	.720**	.595**	.912**	.267	.256
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.120	.137
	N	35	35	35	35	35	35
SAS2	Pearson Correlation	.720**	1	.551**	.734**	.318	.405*
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.063	.016
	N	35	35	35	35	35	35
SAS3	Pearson Correlation	.595**	.551**	1	.576**	.335*	.312
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.049	.068
	N	35	35	35	35	35	35
SAS4	Pearson Correlation	.912**	.734**	.576**	1	.255	.253
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.139	.143
	N	35	35	35	35	35	35
SAS5	Pearson Correlation	.267	.318	.335*	.255	1	.907**
	Sig. (2-tailed)	.120	.063	.049	.139		.000
	N	35	35	35	35	35	35
SAS6	Pearson Correlation	.256	.405*	.312	.253	.907**	1
	Sig. (2-tailed)	.137	.016	.068	.143	.000	
	N	35	35	35	35	35	35
SAS7	Pearson Correlation	.236	.381*	.390*	.261	.793**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.173	.024	.021	.129	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35
Total	Pearson Correlation	.735**	.791**	.717**	.736**	.755**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		SAS7	Total
SAS1	Pearson Correlation	.236	.735**
	Sig. (2-tailed)	.173	.000
	N	35	35
SAS2	Pearson Correlation	.381*	.791**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000
	N	35	35
SAS3	Pearson Correlation	.390*	.717**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000
	N	35	35
SAS4	Pearson Correlation	.261	.736**

	Sig. (2-tailed)	.129	.000
	N	35	35
SAS5	Pearson Correlation	.793**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
SAS6	Pearson Correlation	.725**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	35	35
SAS7	Pearson Correlation	1	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	35	35
Total	Pearson Correlation	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	35	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	7

**TABEL KORELASI PEARSON PRODUCT MOMENT
PADA α 5 %**

N	2-tailed	1-tailed
3	0.9969	0.9877
4	0.9500	0.9000
5	0.8783	0.8054
6	0.8114	0.7293
7	0.7545	0.6694
8	0.7067	0.6215
9	0.6664	0.5822
10	0.6319	0.5494
11	0.6021	0.5214
12	0.5760	0.4973
13	0.5529	0.4762
14	0.5324	0.4575
15	0.5140	0.4409
16	0.4973	0.4259
17	0.4821	0.4124
18	0.4683	0.4000
19	0.4555	0.3887
20	0.4438	0.3783
21	0.4329	0.3687
22	0.4227	0.3598
23	0.4132	0.3515
24	0.4044	0.3438
25	0.3961	0.3365
26	0.3882	0.3297
27	0.3809	0.3233
28	0.3739	0.3172
29	0.3673	0.3115
30	0.3610	0.3061
31	0.3550	0.3009
32	0.3494	0.2960
33	0.3440	0.2913
34	0.3388	0.2869
35	0.3338	0.2826
36	0.3291	0.2785
37	0.3246	0.2746
38	0.3202	0.2709
39	0.3160	0.2673
40	0.3120	0.2638
41	0.3081	0.2605
42	0.3044	0.2573
43	0.3008	0.2542
44	0.2973	0.2512
45	0.2940	0.2483
46	0.2907	0.2455
47	0.2876	0.2429
48	0.2845	0.2403
49	0.2816	0.2377
50	0.2787	0.2353
51	0.2759	0.2329
52	0.2732	0.2306

N	2-tailed	1-tailed
53	0.2704	0.2282
54	0.2679	0.2261
55	0.2654	0.2240
56	0.2630	0.2219
57	0.2607	0.2199
58	0.2584	0.2180
59	0.2562	0.2161
60	0.2540	0.2143
61	0.2519	0.2125
62	0.2499	0.2107
63	0.2479	0.2090
64	0.2459	0.2074
65	0.2440	0.2057
66	0.2421	0.2041
67	0.2403	0.2026
68	0.2385	0.2011
69	0.2368	0.1996
70	0.2351	0.1981
71	0.2334	0.1967
72	0.2318	0.1953
73	0.2302	0.1940
74	0.2286	0.1926
75	0.2271	0.1913
76	0.2256	0.1900
77	0.2241	0.1888
78	0.2226	0.1876
79	0.2212	0.1864
80	0.2198	0.1852
81	0.2185	0.1840
82	0.2171	0.1829
83	0.2158	0.1817
84	0.2145	0.1806
85	0.2132	0.1796
86	0.2120	0.1785
87	0.2107	0.1775
88	0.2095	0.1764
89	0.2084	0.1754
90	0.2072	0.1744
91	0.2060	0.1735
92	0.2049	0.1725
93	0.2038	0.1716
94	0.2027	0.1707
95	0.2016	0.1697
96	0.2006	0.1688
97	0.1995	0.1680
98	0.1985	0.1671
99	0.1975	0.1662
100	0.1965	0.1654
101	0.1955	0.1646
102	0.1946	0.1638

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PNPPTPKP, KP, PN, PP, TP ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.950 ^a	.903	.886	.11578

a. Predictors: (Constant), PNPPTPKP, KP, PN, PP, TP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.602	5	.720	53.748	.000 ^a
	Residual	.389	29	.013		
	Total	3.991	34			

a. Predictors: (Constant), PNPPTPKP, KP, PN, PP, TP

b. Dependent Variable: SAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.060	.421		-.143	.887
	PN	.195	.051	.404	3.858	.001
	PP	.170	.060	.261	2.824	.008
	TP	.301	.052	.714	5.850	.000
	KP	.418	.056	1.031	7.487	.000
	PNPPTPKP	-.001	.002	-.093	-.557	.582

a. Dependent Variable: SAS

UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PN	.307	3.260
	PP	.395	2.535
	TP	.226	4.431
	KP	.177	5.643
	PNPPTPKP	.122	8.218

a. Dependent Variable: SAS

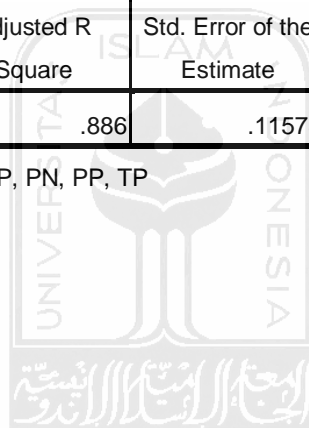
UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.950 ^a	.903	.886	.11578	2.252

a. Predictors: (Constant), PNPPTPKP, KP, PN, PP, TP

b. Dependent Variable: SAS



UJI RANK SPEARMAN HETEROSKEDASTISITAS

Nonparametric Correlations

Correlations

			Standardized Residual
Spearman's rho	PN	Correlation Coefficient	-.015
		Sig. (2-tailed)	.934
		N	35
	PP	Correlation Coefficient	.054
		Sig. (2-tailed)	.758
		N	35
	TP	Correlation Coefficient	.011
		Sig. (2-tailed)	.950
		N	35
	KP	Correlation Coefficient	-.047
		Sig. (2-tailed)	.790
		N	35
	PNPPTPKP	Correlation Coefficient	.057
		Sig. (2-tailed)	.744
		N	35
	Standardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	35

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PN	35	1.60	4.00	2.8057	.70874
PP	35	1.38	4.00	2.8163	.52504
TP	35	1.00	4.00	2.7600	.81139
KP	35	1.00	4.00	2.8489	.84549
PNPPTPKP	35	16.46	163.20	59.7294	30.58714
SAS	35	2.14	3.57	2.9260	.34261
Valid N (listwise)	35				



Frequency Table

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pimpinan	20	57.1	57.1	57.1
Manager keuangan	10	28.6	28.6	85.7
Staf	5	14.3	14.3	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Lama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 - 3 tahunan	3	8.6	8.6	8.6
4 - 6 tahunan	14	40.0	40.0	48.6
> 7 tahun	18	51.4	51.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Gender

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	26	74.3	74.3	74.3
Wanita	9	25.7	25.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Penddkn

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	3	8.6	8.6	8.6
D3	12	34.3	34.3	42.9
S1	20	57.1	57.1	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BMT	25	71.4	71.4	71.4
BPR	10	28.6	28.6	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Lama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 - 5 tahun	15	42.9	42.9	42.9
6 - 10 tahun	2	5.7	5.7	48.6
> 10 tahun	18	51.4	51.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Omzet

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp.50.000.000	7	20.0	20.0	20.0
Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000	3	8.6	8.6	28.6
>Rp.100.000.000	25	71.4	71.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Tabungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	35	100.0	100.0	100.0

Deposito

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	35	100.0	100.0	100.0

Simpan pinjam

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	35	100.0	100.0	100.0

Kredit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	19	54.3	54.3	54.3
Ya	16	45.7	45.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Mudorobah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Tidak	9	25.7	25.7	25.7
	Ya	26	74.3	74.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Musyarokah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	22.9	22.9	22.9
	Ya	27	77.1	77.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Murobahah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	16	45.7	45.7	45.7
	Ya	19	54.3	54.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

Jasa layanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	15	42.9	42.9	42.9
	Ya	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	